

BAB II

GERAKAN #METOO AMERIKA SERIKAT DAN AKTIVISME TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK

Terciptanya Gerakan *#MeToo* dilatarbelakangi oleh inisiatif masyarakat domestik AS untuk menarik perhatian pemerintahnya terhadap masalah pelecehan seksual di negaranya. Gerakan *#MeToo* tercipta melalui kampanye global melawan pelecehan seksual di tempat kerja dimana mobilisasi ini secara independen bergerak di masing-masing negara termasuk AS sendiri. Keseluruhan materi dalam bab dua ini akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mendorong proses pembentukan jaringan advokasi transnasional dari Gerakan *#MeToo*.

Aktivisme Gerakan *#MeToo* AS dan mobilisasi serupa di seluruh dunia dapat diidentifikasi sebagai *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang dijelaskan oleh Keck & Sikkink. TAN merupakan jaringan yang terdiri dari aktor-aktor internasional yang bekerja terhadap suatu isu, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1999, p. 89). Kemunculan dari TAN sendiri didorong oleh tiga faktor yaitu; *Boomerang pattern*; *Political entrepreneurs*; dan *International organizations and conferences* (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Tiga faktor tersebut merupakan pendorong utama dari aktivisme transnasional Gerakan *#MeToo* AS yang akan menjadi pembahasan dalam bab ini.

Sumber: Keck & Sikkink, *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics* (1999), hal. 94

Pola bumerang ini menjadi karakteristik utama dalam kampanye yang target dan tujuannya adalah kebijakan atau perilaku domestik suatu negara terhadap advokasi jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam penjelasan Keck & Sikkink, *boomerang pattern* terjadi ketika terdapat saluran antara pemerintah dan masyarakat domestik terputus sehingga masyarakat tidak mendapatkan akses ke institusi politik atas suatu masalah (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam kasus ini, episentrum awal Gerakan *#MeToo* berasal dari Amerika Serikat, sehingga dalam konteks *boomerang pattern*, TAN mengidentifikasi AS sebagai *State A*. Masalah yang diadvokasikan berupa pelecehan seksual di tempat kerja.

Sistem hukum yang menangani kasus pelecehan seksual di tempat kerja AS sendiri telah tercantum dalam undang-undang Hak Sipil tahun 1964 (Rueb & Chokshi, 2019). Namun para korban enggan melakukan pengaduan hukum terkait pelecehan seksual yang dialaminya. Menurut Komisi Kesempatan Kerja Setara AS (EEOC), menemukan bahwa tiga dari empat wanita yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja tidak pernah melaporkan kejadian tersebut (Koonce, 2019). Sedangkan prevalensi kasus pelecehan seksual di Amerika Serikat tergolong tinggi. Menurut perkiraan data laporan Vox

menunjukkan sekitar 627.700 korban mengalami pelecehan seksual di AS tiap tahunnya (Crockett, 2016).

Minimnya pelaporan hukum oleh masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual tersebut tentunya menunjukkan terdapat adanya suatu masalah dalam sistem hukum yang menangani pelecehan seksual di AS. Saluran antara individu atau kelompok domestik dengan aktor negara atau pemerintah dianggap terputus ketika hukum yang menangani masalah tersebut tidak efektif dan pemerintah tidak responsif terhadap hal tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Akibatnya, muncul aktor yang cukup peduli dengan masalah tersebut untuk mengeluarkan ide dan memicu agar masalah tersebut segera mendapatkan perhatian pemerintah.

Dalam jaringan advokasi transnasional, pelaku jaringan membawa ide, norma, dan wacana baru ke dalam debat kebijakan, dan berfungsi sebagai sumber informasi dan kesaksian (Keck & Sikkink, 1999, p. 90). Ide yang berhasil dimunculkan dalam kasus *#MeToo* adalah aktivisme media sosial yang berhasil dipicu oleh seorang individu domestik Amerika Serikat sendiri. Dengan menggunakan *hashtag #MeToo* sebagai wacana baru bagi orang-orang untuk menumbuhkan kesadaran bersama dan menunjukkan secara terbuka tentang meluasnya masalah ini terjadi. Mencari dukungan melalui perluasan isu tersebut menunjukkan bahwa terdapat seorang individu yang telah menjadi pemicu awal advokasi yang disebabkan oleh terputusnya saluran yang didefinisikan di dalam *boomerang pattern*.

Aktor yang visioner akan muncul dan mengusulkan strategi untuk aksi politik di sekitar masalah yang tampaknya tidak terselesaikan, potensi berubah menjadi jaringan aksi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Seorang individu lebih memilih untuk mencari cara selain melakukan pengaduan ke penegak hukum karena sistem hukum dianggap kurang efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Memajukan isu menjadi berita arus utama merupakan langkah awal dari advokasi agar mendapatkan perhatian pemerintah AS terhadap masalah pelecehan seksual yang bukan merupakan masalah baru di AS. Aktivis secara aktif mencari cara untuk membawa masalah ke agenda publik, baik dengan membingkainya dengan cara inovatif maupun dengan mencari tempat yang ramah bagi advokasi mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Terkadang mereka menciptakan masalah dengan membingkai masalah lama dengan cara baru, dimana mereka membantu mengubah pemahaman aktor lain tentang identitas dan minat mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

Ide yang dimunculkan tersebut berhasil mencapai momentum dimana *#MeToo* telah meluas secara global dan mendorong kampanye dan kemunculan mobilisasi serupa di negara-negara lain. Para aktivis maupun LSM domestik maupun internasional mulai bermunculan secara bersamaan akibat meluasnya kesadaran atas advokasi melalui kecepatan media sosial. Mereka muncul tidak terorganisir sebagai bagian dari Gerakan *#MeToo* untuk melanjutkan advokasi dan meningkatkan intensitas perhatian terhadap masalah ini. Baik serikat

pekerja, organisasi pengusaha, organisasi perempuan, akademisi, maupun individu terhubung dalam satu pandangan yang sama.

TAN terbentuk melalui bersatunya sejumlah besar individu yang berbeda-beda, baik melalui konteks pribadi, profesional maupun organisasi untuk mengembangkan pandangan dunia yang serupa (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Jaringan dapat berupa sekutu internasional baik dari organisasi di negara lain maupun dengan negara yang memiliki visi dan perhatian yang sama terhadap masalah yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dengan memiliki dukungan dari aktor-aktor tersebut, mereka akan kembali membawa advokasi lebih kuat untuk menekan negaranya dari luar (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Aktivisme transnasional terbentuk melalui pertukaran informasi yang ditandai dengan upaya perluasan tagar *#MeToo* sebagai advokasi mereka atas masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Jaringan secara tidak langsung terbentuk melalui peningkatan kesadaran bersama terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Pola bumerang dapat diidentifikasi ketika Gerakan *#MeToo* AS mulai bekerja secara transnasional dan terhubung dengan aktor-aktor diluar negara dan pemerintah AS untuk memperkuat tuntutan perubahan hukum domestik tersebut.

Poin utama mereka menekankan pada strategi membangun kesadaran dimana mereka mengemas sedemikian rupa isu yang diadvokasikan untuk memberikan pengaruh. Mereka mulai melakukan advokasi yang bersifat persuasif untuk mengajak orang-orang

mendukung dan setuju dengan pemahaman mereka. Inti utama advokasi mereka adalah mengubah budaya pelecehan seksual di tempat kerja yang mereka anggap tidak sesuai dengan pemahaman norma bersama mereka.

Jaringan mempromosikan konvergensi norma atau harmonisasi di tingkat regional dan internasional yang dianggap penting untuk integrasi aspek sosial dan budaya (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Konvergensi menyoroti dimensi penting yang mengarah pada sentralitas nilai-nilai atau ide-ide berprinsip (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Dengan kepercayaan bahwa individu dapat membuat perbedaan melalui informasi kreatif oleh aktor-aktor non-pemerintah, dan strategi politik yang canggih dalam menargetkan kampanye mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Selanjutnya jaringan mempromosikan implementasi norma tersebut dengan menekan aktor sasaran untuk mengadopsi kebijakan baru dengan memantau kepatuhan dengan standar regional dan internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 91).

LSM baik domestik maupun internasional memainkan peran sentral dalam TAN, di mana mereka yang memulai tindakan dan menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi (Keck & Sikkink, 1999, p. 92). Dalam hal ini keaktifan para aktor yang tergabung dalam Gerakan *#MeToo* baik AS maupun global terus memperluas isu ini dengan memanfaatkan momentum tagar. Kesuksesan tagar telah mendorong mobilisasi serupa yakni munculnya Gerakan *#MeToo* secara independen di berbagai negara di mana mereka juga menyalurkan

advokasi di negaranya. Beberapa diantaranya adalah *#NiUnaMenos* di Argentina, *#BalanceTonPorc* di Perancis, *#TheFirstTimeIGotHarassed* di Mesir, *#WithYou* di Jepang, dan masih banyak lagi tersebar di negara-negara lain (MacKinnon, 2019).

Mobilisasi pada tiap-tiap negara tersebut telah menciptakan aliansi potensial lintas gerakan yang beragam untuk mengadvokasikan tujuan dari kampanye *#MeToo*. Dalam memberikan tekanan kepada negara episentrum awal gerakan, jaringan juga menargetkan suatu negara yang memiliki potensi kuat secara politik sebagai penekan dalam *boomerang pattern*. Namun dalam mengidentifikasi *state B* dalam kasus ini dapat dilihat dari tekanan secara tidak langsung yang didorong oleh meningkatnya kesadaran melalui reformasi legislatif yang terjadi di beberapa negara di luar AS sebagai dampak dari Gerakan *#MeToo*. Hal ini dikarenakan upaya pengaruh gerakan melalui peningkatan kesadaran kolektif. Sehingga tuntutan gerakan tidak hanya bertujuan memengaruhi hukum pelecehan seksual di AS namun pada tiap-tiap negara dimana Gerakan *#MeToo* berkembang.

Di tingkat internasional mereka memperkuat isu dengan advokasi secara masif dan dengan bantuan media global yang mempublikasikan tindakan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan kesadaran global dan mendorong banyak pihak terutama yang memiliki *power* besar untuk berinisiatif menciptakan perubahan sebagai solusi terhadap masalah yang diadvokasikan. Pada saat yang sama, pada tingkat nasional, mereka terus memperkuat klaimnya melalui advokasi

dengan membingkai isu agar menjadi diskusi nasional dan mendapatkan sorotan media. Advokasi dapat berupa meningkatnya cerita atau pengalaman yang terkait dengan pelecehan seksual ataupun kesadaran terhadap pelaporan kepada penegak hukum atas haknya, hingga audiensi yang diadakan oleh para aktivis untuk mendiskusikan masalah. Ketika masalah semakin sering di publikasi maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut memajukan isu dan tuntutan perubahan. Akibatnya beberapa negara di mana mobilisasi Gerakan *#MeToo* berkembang telah mengalami reformasi legislatif terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja.

Reformasi legislatif telah terjadi di berbagai negara sebagai dampak meluasnya eksistensi Gerakan *#MeToo* (Stone & Vogelstein, 2019). Di Perancis, RUU tentang pelecehan seksual yang lebih komprehensif telah disahkan pada Agustus 2018 (Stone & Vogelstein, 2019). Bahkan negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki sistem hukum yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja seperti Tiongkok dan Jepang juga telah merumuskan kebijakan untuk menanggapi hal tersebut (Stone & Vogelstein, 2019).

Meningkatnya reformasi legislatif terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja di berbagai negara telah menunjukkan keberhasilan pengaruh Gerakan *#MeToo* dalam membangun kesadaran bersama dan mengubah perilaku negara. Hal ini tentu menciptakan resonansi bagi AS untuk turut mereformasi undang-undangnya sebagai negara titik awal di mana Gerakan *#MeToo* bermula. Hal ini secara tidak

langsung dapat menekan pemerintah AS ketika kesadaran mengenai masalah tersebut telah menciptakan gelombang untuk merespons dengan perubahan kebijakan yang lebih komprehensif.

Jaringan *#MeToo* global terus memperkuat pengaruh tidak hanya pada suatu negara tertentu sebagai penekan, namun juga dengan cara lain melainkan dengan mencari dukungan oleh *intergovernmental organization* yang dianggap kuat secara politik. Hal ini tentunya sebuah strategi yang disebutkan dalam *boomerang pattern* untuk memberikan tekanan kepada negara target yakni melalui tekanan dari *intergovernmental organizations* (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Jaringan akan berusaha untuk memaksimalkan pengaruh mereka terhadap target tindakan mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Mereka mulai mempengaruhi posisi diskursif ketika mereka membujuk negara atau organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional atau mengubah posisi kebijakan domestik terhadap advokasi jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Misalnya menekan negara-negara bagian atau organisasi internasional untuk membuat komitmen yang lebih mengikat dengan menandatangani konvensi dan kode etik terhadap masalah yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98).

Dalam kasus ini, *Intergovernmental organizations* yang paling memungkinkan adalah PBB, dimana badan PBB yang paling kompatibel terhadap masalah ini adalah ILO (*International Labour Organizations*). Disaat yang bersamaan dengan meluasnya kesadaran terhadap pelecehan seksual di tempat kerja juga telah memengaruhi

internal organisasi PBB. Gerakan *#MeToo* telah berdampak pada peningkatan laporan pelecehan seksual di arena internal PBB sendiri (Vogelstein, 2018). Kesadaran tercipta di dalam internal PBB di mana Sekretaris Jenderal PBB António Guterres membentuk gugus tugas pelecehan seksual untuk meninjau dan meningkatkan kebijakan PBB (Vogelstein, 2018). Upaya membangun kesadaran bersama terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja oleh jaringan terus mengalami kemajuan ditandai dengan diadakannya konvensi atas inisiatif ILO (Stone & Vogelstein, 2019).

ILO mengadakan pertemuan dalam *International Labour Conference* (ILC) dan menghasilkan konvensi baru dan rekomendasi PBB untuk memerangi pelecehan seksual di dunia kerja (ILO, 2019). ILC mengadakan pertemuan tiap tahun di bulan Juni, di mana inisiatif dalam mendiskusikan masalah ini pertama kali dilakukan pada Juni 2018 di sesi ke-107 ILC (ILO, 2019). Namun konferensi tersebut baru menghasilkan teks yang diusulkan untuk konvensi dan rekomendasi mengenai penetapan standar untuk mengakhiri pelecehan seksual di tempat kerja (ILO, 2019). Dilanjutkan pada tahun setelahnya pada Juni 2019, sesi ke-108 ILC kembali diadakan untuk mendiskusikan keberlanjutan penetapan standar hukum internasional tersebut.

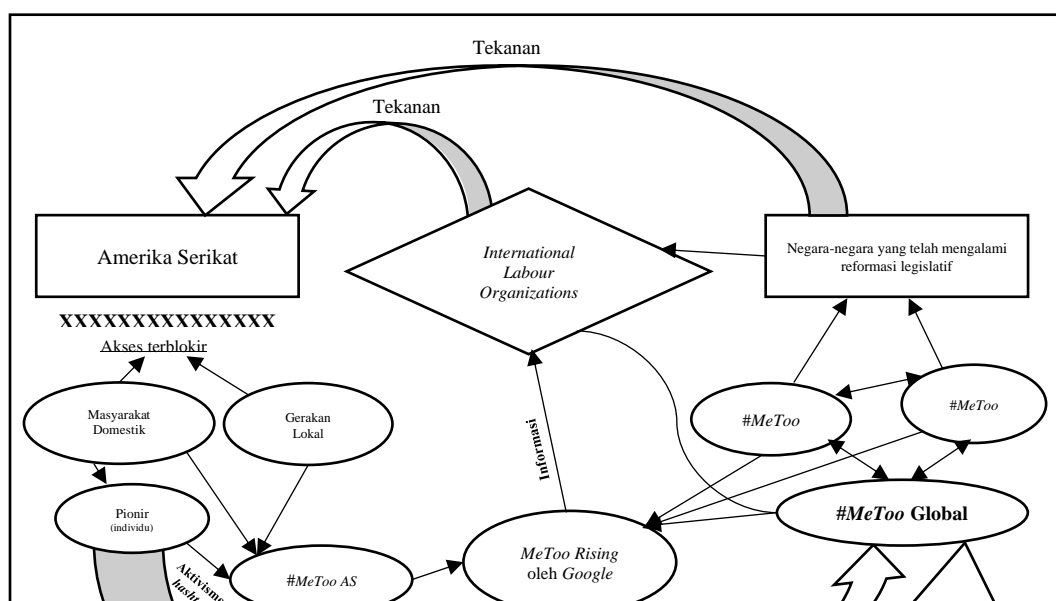
Pertemuan ini berhasil mengadopsi '*The Violence and Harassment Convention 2019*', dan '*Violence and Harassment Recommendation 2019*' pada tanggal 21 Juni 2019 melalui *The Centenary International Labour Conference*, di Geneva (ILO, 2019).

Upaya penetapan preseden internasional baru ini akan menyerukan negara-negara yang meratifikasinya untuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi pelecehan seksual (Stone & Vogelstein, 2019). Dengan dikeluarkannya rekomendasi ini, ILO akan mengharuskan negara-negara anggotanya mengadopsi undang-undang yang menangani pelecehan seksual di tempat kerja.

Dengan berhasilnya ILC dalam mengadopsi *Convention 190* dan *Recommendation 206* menghasilkan resolusi bahwa negara-negara anggota harus segera meratifikasinya. Hal ini merupakan upaya yang akan mendesak pemerintah AS yang merupakan anggota ILO untuk turut mereformasi undang-undangnya yang mengatur tentang masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Sehingga *boomerang pattern* dalam kasus ini ditunjukkan dalam keberhasilan Gerakan *#MeToo* secara kolektif baik AS maupun global dalam memengaruhi kesadaran ILO, yang kemudian mendorong tekanan ILO terhadap AS sebagai *State A*. Pola bumerang berdasarkan aktivisme Gerakan *#MeToo* dapat dilihat melalui gambar 2.

Gambar 2. Boomerang Pattern dalam Aktivisme TAN

Gerakan *#MeToo*



Sumber: Diolah dari Keck & Sikkink, *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics* (1999), hal. 94

Dalam penjelasan *boomerang pattern*, pada tahap pertama, jaringan mulai mengawali advokasi dengan menghasilkan perhatian pada masalah baru (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Mereka berupaya membantu mengatur agenda ketika mereka memprovokasi perhatian media, debat, audiensi, dan pertemuan tentang isu-isu yang sebelumnya bukan masalah debat publik (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Hal ini dibuktikan dengan aktivisme media sosial sebagai pemicu dari advokasi awal suatu masalah yang akhirnya berkembang menjadi aksi kolektif global.

Pada tahap kedua, jaringan mulai mempengaruhi posisi diskursif ketika mereka membantu membujuk negara dan organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional atau mengubah posisi kebijakan domestik terhadap advokasi jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Misalnya menekan negara-negara bagian atau organisasi

internasional untuk membuat komitmen yang lebih mengikat dengan menandatangani konvensi dan kode etik terhadap masalah yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98).

Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Gerakan *#MeToo* dalam upaya membangun kesadaran dalam memengaruhi ILO untuk berinisiatif menciptakan standar hukum internasional tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Standar hukum internasional ini tentu akan menjadi penekan bagi AS untuk melakukan reformasi legislatif terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja. Amerika Serikat sebagai salah satu bagian dari anggota ILO dan di sisi lain merupakan pemicu awal Gerakan *#MeToo* tentunya akan terdesak dengan hal tersebut.

Komitmen global yang ditunjukkan melalui diadopsinya *Convention 190* dan *Recommendation 206* dilanjutkan dengan resolusi pertama untuk mengundang negara-negara anggota meratifikasi konvensi tersebut. Namun adopsi *Convention 190* tersebut belum ada negara anggota yang meratifikasi termasuk Amerika Serikat sendiri. Sehingga analisis *boomerang pattern* ini berhenti pada tekanan ILO terhadap AS melalui desakan bagi negara-negara anggota untuk meratifikasi konvensi penghapusan pelecehan seksual di dunia kerja tersebut. Konvensi belum dapat diberlakukan sebelum minimal di ratifikasi oleh dua negara anggota. Hal ini tentunya belum dapat secara kuat mendorong AS untuk mematuhi standar hukum yang dibuat tersebut karena belum resmi diberlakukan. Sehingga pola bumerang dalam kasus ini belum berhasil secara keseluruhan untuk mendesak AS

mereformasi hukumnya agar disesuaikan dengan standar hukum internasional tersebut.

2.2. *Political Entrepreneurs* dalam Aktivisme Gerakan #MeToo Amerika Serikat

Sebuah norma ataupun nilai dalam masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, begitu pula dengan suatu isu tertentu yang mengandung norma atau nilai tentu memiliki pemicu atau pencetusnya. Aktivistis merupakan orang yang cukup peduli dengan beberapa masalah tertentu, dimana mereka akan antusias untuk bertindak dalam mencapai tujuan mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Mereka akan memajukan klaim terhadap isu tertentu yang menjadi perhatian mereka. Keck & Sikkink menyebut mereka sebagai '*political entrepreneurs*' sebagai orang yang merintis dan membentuk jaringan pertama kali dimana mereka juga yang menjadi aktor dalam proses kemunculan suatu isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Mereka menyerukan perhatian terhadap sebuah masalah tertentu yang mengandung norma atau nilai-nilai tertentu yang seringkali bersifat persuasif untuk memperluas jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Isu pelecehan seksual di tempat kerja yang dimajukan dalam kasus tagar #MeToo menjadi perhatian dunia dengan menggarisbawahi masalah perempuan dalam lingkungan pekerjaan. Pengaturan budaya dan norma-norma yang mengarah pada klaim pelecehan seksual di tempat kerja bagi perempuan cenderung memiliki sedikit resonansi di

antara masyarakat domestik. Pelanggaran ini pada dasarnya umum terjadi, namun akses masyarakat untuk melaporkan kepada penegak hukum dimungkinkan terhambat oleh beberapa faktor tertentu.

Dalam sebuah survei nasional AS yang meneliti mengenai keengganan orang Amerika dalam melaporkan pelecehan seksual di tempat kerjanya menghasilkan dua faktor (Hart, 2019). *Pertama*, risiko karier di mana orang-orang enggan melaporkan karena hal tersebut akan membuat karier mereka terancam (Hart, 2019). Hambatan yang menunjukkan masalah ini sebagian besar dialami perempuan yang seringkali inferior di dalam dunia pekerjaan yang masih didominasi oleh laki-laki. *Kedua*, budaya atau stigma orang Amerika terhadap korban pelecehan seksual adalah buruk secara sosial atau cenderung menyalahkan korban (Hart, 2019). Faktor dimana budaya dan norma yang berkembang di masyarakat bahwa tindakan pelecehan seksual merupakan masalah yang memperlakukan untuk dipublikasikan.

Meskipun masalah pelecehan seksual telah memiliki legitimasi sendiri bagi korban untuk melaporkan, budaya dan norma yang berkembang di masyarakat tidak memberikan dukungan bagi korban. Akibatnya sebagian besar korban pelecehan seksual, khususnya perempuan di tempat kerjanya tidak melaporkan pelanggaran tersebut. Aktivisme media sosial kemudian dikembangkan oleh seorang aktor yang pertama kali memprovokasi masalah agar menjadi perhatian publik. Dengan bantuan aktivis lainnya yang juga aktif dan perhatian dengan masalah pelecehan seksual di tempat kerja tersebut telah

mendorong terciptanya koneksi untuk membicarakan pandangan yang sama terhadap masalah ini.

Orang-orang yang menjadi pelopor tersebut dapat dikatakan sebagai '*political entrepreneurs*' dimana mereka aktif memperjuangkan advokasi yang mengandung nilai atau norma tertentu (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Isu-isu berbasis nilai-nilai dan norma seperti isu-isu hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, pelecehan seksual dan lain sebagainya, dapat mendorong masyarakat di berbagai penjuru dunia membangun satu kesamaan cara pandang mengenai isu tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam bagian ini penelitian akan mencoba menganalisa beberapa aktor atau aktivis yang memenuhi spesifikasi sebagai '*political entrepreneurs*' menurut TAN dalam aktivisme Gerakan #MeToo AS.

Pada aktivisme Gerakan #MeToo ini, *political entrepreneurs* merupakan para aktor baik individu maupun organisasi yang menjadi *networker* inti dari aksi kolektif ini. Mereka aktif mengadvokasikan #MeToo agar mencapai tujuan dari gerakan untuk memengaruhi perubahan kebijakan. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi Alyssa Milano dan Tarana Burke sebagai individu yang dapat dikatakan sebagai *political entrepreneurs* dalam studi kasus Gerakan #MeToo. Keduanya merupakan aktivis yang menjadi bibit terciptanya jaringan dimana mereka telah berupaya memajukan misi dan kampanye melawan pelecehan seksual di AS dengan cara-cara mereka.

Aktivis atau '*political entrepreneurs*' percaya bahwa jejaring akan memajukan misi dan kampanye mereka, dan secara aktif mempromosikannya (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam jaringan advokasi transnasional, pelaku jaringan membawa ide, norma, dan wacana baru ke dalam debat kebijakan, dan berfungsi sebagai sumber informasi dan kesaksian (Keck & Sikkink, 1999, p. 90). Aktor yang visioner akan muncul dan mengusulkan strategi untuk aksi politik di sekitar masalah yang tampaknya tidak terselesaikan, potensi berubah menjadi jaringan aksi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Aktivis atau *political entrepreneurs* merupakan bagian dari seorang aktor yang berperan dalam *boomerang pattern* di atas.

Alyssa Milano merupakan aktor utama yang berupaya memprovokasi masalah pelecehan seksual yang dialaminya untuk mendorong para korban lainnya yang mungkin terhambat untuk bersuara dan mengungkapkan. Ia merupakan pelopor yang mencetuskan isu dengan membawa masalah pelecehan seksual khususnya di tempat kerja yang sebelumnya masalah ini mengandung konotasi negatif di arena masyarakat AS. Budaya dan norma yang berkembang di masyarakat terhadap masalah ini cenderung negatif untuk dipublikasikan sehingga kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat dan pemerintah. Sebagai orang yang memiliki kesadaran tinggi untuk melawan masalah pelecehan seksual yang berkembang di masyarakat, Milano memiliki inisiatif agar masalah ini diperhatikan lalu ditangani dan dicegah.

Upaya yang dilakukannya untuk melawan norma yang menurutnya tidak sesuai akhirnya dilakukan dengan advokasi mencari dukungan melalui *platform* media sosialnya. Akibatnya budaya pelaporan terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja berhasil meningkat di Amerika Serikat pasca tagar *#MeToo* meluas melalui kecepatan media sosial. Milano dapat dikatakan sebagai '*political entrepreneurs*', dimana ia berhasil mengubah stigma buruk masyarakat yang sebelumnya cenderung menyalahkan para korban pelecehan seksual. Ia merupakan promotor utama yang mendorong meningkatnya kesadaran terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Norma masyarakat yang menjatuhkan korban telah berbalik untuk mendukung korban pelecehan seksual dan membuat para korban mulai berani untuk mengungkapkan.

Isu berbasis norma dalam kasus *#MeToo* telah menciptakan pertumbuhan koneksi antara orang-orang yang antusias memperhatikan masalah ini dan mendorong tindakan bersama. Kampanye melawan pelecehan seksual akhirnya mulai terbangun, dimana jaringan mulai tercipta dan dikenal dengan *#MeToo Movement* yang meluas secara global. Para aktivis terus aktif mengadvokasikan isu secara persuasif untuk mendorong pertumbuhan jaringan dan dukungan lebih besar lagi. Jaringan membiakkan jaringan, dimana mereka menjadi repertoar tindakan yang tersebar secara transnasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam bidang isu ini, partisipasi jaringan transnasional telah menjadi komponen penting dari identitas kolektif para aktivis yang

terlibat (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Disinilah pemicu awal bagaimana jaringan terbentuk melalui pandangan yang sama terhadap isu berbasis norma yang di provokasi oleh '*political entrepreneurs*'.

Di sisi lain, Tarana Burke turut menjadi sorotan media nasional setelah diketahui bahwa ia telah mendirikan "*MeToo Movement*" yang merupakan sebuah gerakan akar rumput sejak tahun 2006 di Alabama, AS (Carlsen, et al., 2018). Burke juga dapat dikatakan sebagai salah satu *political entrepreneurs* dimana ia telah membangun landasan dari gerakan melawan pelecehan seksual di AS. Meskipun pada waktu itu gerakan hanya berfokus pada penanganan para penyintas pelecehan seksual dari kalangan wanita kulit berwarna di Alabama (MeToo Movement, 2019).

Hal ini telah membuktikan bahwa Burke merupakan orang yang visioner terhadap masalah pelecehan seksual dan telah memiliki upaya untuk merubah pandangan dan norma yang salah tersebut melalui gerakan lokal yang didirikannya. Meskipun pada waktu itu gerakan belum memiliki pengaruh besar seperti saat ini setelah mempengaruhi dunia tempat kerja melalui *hashtag #MeToo* oleh Milano, '*MeToo Movement*' telah menjadi fondasi dari Gerakan *#MeToo* AS. Pada akhirnya Gerakan *MeToo* setelah *#MeToo* mulai dikembangkan kembali dalam website resmi *MeToo Movement* oleh Tarana Burke dengan slogan "*you are not alone, Me Too*" (MeToo Movement, 2019).

Burke sebagai aktivis yang menjadi sorotan publik saat ini terus melanjutkan uoaya advokasi melalui *website* resminya untuk tetap

memperkenalkan Gerakan dan tujuan dari gerakan. Dalam *website* resminya, *MeToo Movement* memberikan informasi sumber daya nasional dan organisasi lokal yang turut menjadi advokat dalam menangani masalah seputar pelecehan seksual di tempat kerja domestik AS (MeToo Movement, 2019). Sumber daya nasional tersebut menawarkan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual termasuk sumber daya hukum domestik AS (MeToo Movement, 2019). Beberapa sumber nasional tersebut adalah *The National Sexual Violence Resource Center (NSVRC)*, *American Civil Liberties Union (ACLU)*, *National Women's Law Center (NWLC)*, *Time's Up Legal Defense Fund* dan sumber-sumber nasional lainnya yang tersedia di arena domestik AS (MeToo Movement, 2019).

Di sisi lain, dengan meluasnya kesadaran akan masalah ini telah mendorong lebih banyak organisasi lokal yang menjadi mitra gerakan untuk turut menjadi advokat dan bagian dari Gerakan *#MeToo*. Mereka aktif melakukan advokasi di arena domestik untuk menunjukkan urgensi dari masalah yang diadvokasikan dan mendorong tuntutan perubahan hukum atas masalah tersebut. Berbagai organisasi lokal yang tergabung dalam aktivisme ini menyediakan berbagai sumber layanan bagi para penyintas untuk memberikan dukungan terhadap mereka (MeToo Movement, 2019). Beberapa diantaranya adalah; *2nd Chance, Inc.*; *360 Communities Sexual Assault Services*; *Abuse and Rape Crisis Center*; *Advocacy & Resource Center*; dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh negara bagian AS untuk menyediakan layanan yang

berkaitan dengan advokasi Gerakan *#MeToo* (MeToo Movement, 2019). Sekumpulan organisasi dan gerakan lokal ini terdiri dari orang-orang dengan posisi berbeda-beda dan terhubung dalam satu pandangan yang sama terhadap suatu isu dan turut aktif memperjuangkan isu tersebut.

Baik Burke maupun Milano, keduanya sesuai untuk dikatakan sebagai '*political entrepreneurs*'. dimana keduanya merupakan penggerak isu utama dan pencetus norma untuk pertama kalinya agar menjadi perhatian nasional. Keck & Sikkink mendefinisikan '*political entrepreneurs*' sebagai orang yang merintis dan membentuk jaringan pertama kali dimana mereka juga yang menjadi aktor dalam proses kemunculan suatu isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Keck & Sikkink juga mendefinisikan '*political entrepreneurs*' bagi aktivis yang aktif mempromosikan dan memajukan misi dan kampanye melalui jejaring untuk menguatkan isu mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dalam hal ini, Milano dan Burke sebagai '*political entrepreneurs* terus memperkuat advokasi mereka melalui *website* resmi dan aktif mengadakan audiensi yang membahas keberlanjutan gerakan untuk mendapatkan sorotan media lebih besar lagi. Mereka menjadi sumber informasi utama dari aktivisme Gerakan *#MeToo* nasional AS.

Di sisi lain, melalui posisinya sebagai selebriti, Milano berupaya mengumpulkan orang-orang *Hollywood* untuk turut mendukung kampanye *#MeToo* yaitu melalui terbentuknya Gerakan *#Time's Up*. Gerakan ini merupakan langkah untuk melanjutkan kampanye *#MeToo*

yang beranggotakan selebriti *Hollywood* (Langone, 2018). Dengan menargetkan arena selebriti *Hollywood*, Milano telah secara aktif mencari peluang untuk mendapatkan sorotan media agar isu ini semakin menjadi berita arus utama. *Political entrepreneurs* dalam jaringan advokasi dapat berupa organisasi maupun individu dimana mereka memobilisasi sumber daya seperti informasi dan keanggotaan, serta memikirkan struktur peluang politik di mana mereka harus beroperasi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91)

Sentralitas pada nilai-nilai atau ide-ide berprinsip adalah dimensi penting jaringan, di mana individu dipercaya dapat membuat perbedaan, melalui pertukaran informasi dan penggunaan aktor-aktor non-pemerintah sebagai strategi politik dalam kampanye mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Gerakan *Time's Up* juga merupakan bagian dari Gerakan *#MeToo* di mana organisasi ini juga menunjukkan kesadaran untuk meningkatkan hukum pelecehan seksual di tempat kerja dengan turut mengadvokasikan *#MeToo*. Hal ini dibuktikan dengan upaya gerakan dalam mengumpulkan dana hukum dalam '*Time's Up Legal Defense Fund*' yang dikelola di bawah administrasi *National Women's Law Center* (Langone, 2018).

Dana hukum ini diperuntukkan bagi orang-orang di seluruh industri terutama pada industri rendah untuk mendapatkan akses ke sistem hukum (Langone, 2018). Gerakan bekerjasama dengan beberapa advokat terkemuka untuk kesetaraan dan keselamatan di tempat kerja untuk meningkatkan undang-undang dan kebijakan perusahaan untuk

memerangi pelecehan seksual di tempat kerja (Langone, 2018). Aktivis inti atau '*Political entrepreneurs*' akan terus aktif dalam memobilisasi sumber daya seperti informasi dan keanggotaan dalam jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91). Mereka menunjukkan kesadaran penuh tentang struktur peluang politik di mana mereka beroperasi (Keck & Sikkink, 1999, p. 91).

Para aktivis yang disebut sebagai '*political entrepreneurs*' ini merupakan *networkers* inti dalam kampanye isu yang diadvokasikan jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Biasanya mereka merupakan orang yang telah mengenal jauh dan bahkan mendapatkan pengalamannya sendiri terhadap suatu masalah yang menjadi advokasi mereka tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dengan begitu, isu atau norma yang mereka cetuskan tersebut akan tersebar dan mulai diyakini oleh orang lain (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Tujuan akhir dari jaringan adalah bahwa isu akan diadaptasi menjadi sebuah norma yang disepakati oleh negara melalui upaya advokasi jaringan. Singkatnya, aktivis mencetuskan norma yang dimajukan untuk mendapatkan perilaku kolektif dan pada akhirnya memberikan efek konstitutif bagi negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

2.3. *International Conference and Organizations* yang Mendukung Aktivisme Transnasional Gerakan #MeToo Amerika Serikat

Poliferasi organisasi dan konferensi internasional saat ini telah menyediakan peluang akses yang lebih besar bagi jaringan advokasi transnasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Dengan keaktifan dari para aktivis jaringan, mereka akan berupaya keras dalam menemukan tempat-tempat yang potensial untuk mengejar klaim mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Pada akhirnya mereka akan memanfaatkan organisasi-organisasi internasional maupun konferensi internasional yang memiliki fokus yang sama dengan isu yang mereka advokasikan untuk memperluas kontak internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Akses jaringan melalui kontak internasional inilah yang merupakan faktor selanjutnya yang mendukung terbentuknya TAN setelah aktivis secara aktif mengadvokasikan isu (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Gerakan #MeToo terbentuk oleh sebuah momentum yang berskala global tentunya para aktivis yang terlibat dalam jaringan akan memanfaatkan momentum ini. Baik aktivis yang merupakan *political entrepreneurs* maupun aktivis lainnya yang terlibat dengan jaringan #MeTo, tentunya akan mencari koneksi lebih banyak ke saluran internasional mengetahui bahwa #MeToo sendiri tengah menjadi perbincangan global.

Tentunya organisasi-organisasi maupun gerakan internasional lainnya yang memiliki perhatian sama terkait isu pelecehan seksual di

tempat kerja sedang melakukan diskusi untuk membahas *#MeToo*. Terbukti pasca *#MeToo* meluas di berbagai negara, konferensi internasional maupun domestik pada beberapa negara yang membahas mengenai *#MeToo* mulai bermunculan. Hal ini menjadi peluang bagi para aktivis Gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat untuk mencari koneksi internasional agar bersama-sama mencari solusi terkait masalah global ini termasuk masalah bagi domestik Amerika Serikat sendiri.

Gerakan *#MeToo* telah dikenal secara global sebagai kampanye memerangi pelecehan seksual di tempat kerja di mana kasus ini banyak dialami oleh perempuan. Beberapa badan organisasi maupun gerakan yang memiliki perhatian terhadap masalah tersebut mulai memperlihatkan eksistensi mereka untuk turut menyuarakan hal tersebut. Mereka secara kolektif terdiri dari berbagai organisasi yang bergerak secara internasional dari organisasi yang berbasis perempuan hingga organisasi berbasis hak asasi manusia di dunia kerja. Masalah mengenai isu pelecehan seksual di tempat kerja merupakan masalah global yang dialami tidak hanya satu atau dua negara, sehingga memungkinkan banyaknya pihak yang mengadakan konferensi untuk berdiskusi terkait masalah ini.

Melalui perluasan kesadaran bersama tentunya masalah global ini semakin diperhatikan oleh organisasi-organisasi besar di dunia untuk mencari solusi bersama. Salah satu contoh bentuk kesadaran yang paling menonjol di antara aktor-aktor ini adalah ILO, yang menyediakan wadah diskusi Gerakan *#MeToo* melalui pertemuan dalam *International*

Labour Conference (ILC). Pasca momentum *#MeToo*, pertemuan ILC yang diadakan tiap tahun pada bulan Juni mulai mendiskusikan tantangan *#MeToo* dalam dunia kerja. ILO bertujuan untuk menciptakan perlindungan terhadap dunia pekerjaan secara global, sehingga kekerasan dan pelecehan di dunia kerja merupakan tantangan bagi tujuannya tersebut. Mulai tahun 2018, konferensi ILC membuka diskusi yang menunjukkan upaya ILO dalam menciptakan standar yang mendefinisikan ‘kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja’ untuk mencegah dan mengatasinya.

Kesadaran global terhadap isu pelecehan seksual di tempat kerja yang diadvokasikan Gerakan *#MeToo* telah memengaruhi organisasi yang memiliki *power* besar di arena internasional. Konferensi yang diadakan atas inisiatif ILO telah memberikan peluang bagi Gerakan *#MeToo* untuk memperkuat klaimnya dan mengejar tujuannya. Dalam setiap konferensi ILC, tiap negara memiliki empat representatif yaitu dua delegasi pemerintah, satu delegasi pengusaha, dan satu delegasi pekerja, dan para penasehat masing-masing (ILO, 2019). Delegasi AS diwakili oleh empat representatif wajib dengan kurang lebih 40 penasehat keseluruhan yang sebagian besar merupakan pekerja (ILO, 2019).

ILC pada Juni 2018 merupakan sesi ke-107 menghasilkan teks yang diusulkan untuk konvensi dan rekomendasi mengenai penetapan standar untuk mengakhiri pelecehan seksual di tempat kerja (ILO, 2019). Dilanjutkan pada tahun setelahnya pada Juni 2019, sesi ke-108

ILC kembali diadakan untuk mendiskusikan keberlanjutan penetapan standar hukum internasional tersebut (ILO, 2019). Pada konferensi ke-108 ini, delegasi Amerika Serikat sendiri turut berpartisipasi dalam pemungutan suara di mana pada bagian konvensi keempat delegasi AS menyetujui adopsi tersebut (ILC, 2019). Sedangkan dalam pemungutan suara terhadap rekomendasi, hanya delegasi pekerja yang menyetujui sedangkan delegasi tiga lainnya golput (ILC, 2019). Berdasarkan hasil suara keseluruhan negara anggota, ILC berhasil mengadopsi '*The Violence and Harassment Convention 2019*', atau *Convention 190* dan '*Violence and Harassment Recommendation 2019*' atau *Recommendation 206* pada tanggal 21 Juni 2019 (ILO, 2019).

Konvensi ini merupakan langkah ILO dalam merespons masalah global yakni pelecehan seksual di tempat kerja dengan menciptakan standar hukum internasional sebagai upaya penanganan global. Kedua pencapaian adopsi tersebut telah dimasukkan ke dalam resolusi ILO dalam rangka penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Resolusi berupa; mengundang negara-negara anggota untuk meratifikasi Konvensi; mengundang pemerintah, untuk berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja untuk mengimplementasikan konvensi dan rekomendasi tersebut; dan mengundang Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional untuk meminta Direktur Jenderal untuk mengembangkan strategi komprehensif untuk ratifikasi luas Konvensi Kekerasan dan Pelecehan 2019 dan implementasinya (ILC, 2019). Berdasarkan tahapan saat ini, resolusi tersebut belum berjalan

karena belum ada negara anggota yang meratifikasi *Convention 190* (ILO, 2019). Untuk mencapai diberlakukannya resolusi ini mengharuskan minimal dua negara anggota untuk meratifikasi standar hukum tersebut (ILO, 2019). Namun dalam hal ini, ILO telah memiliki kontribusi besar untuk menciptakan langkah global untuk mengatasi masalah pelecehan seksual di tempat kerja yang diadvokasikan oleh Gerakan *#MeToo*.

ILO merupakan salah satu organisasi internasional berpengaruh di dunia yang memiliki perhatian yang sama dengan Gerakan *#MeToo* terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja. ILO dapat dikatakan sebagai organisasi internasional yang berkontribusi dalam aktivisme transnasional Gerakan *#MeToo* AS, dimana mereka telah menyediakan peluang untuk memperkuat Gerakan *#MeToo* melalui konferensi internasional. Konferensi internasional dan bentuk-bentuk kontak internasional lainnya telah menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Gerakan *#MeToo* terus berupaya secara transnasional dalam memperkuat advokasi untuk menyentuh kesadaran organisasi yang memiliki potensi politik besar dan kuat. Aktivis jaringan kreatif dalam menemukan tempat-tempat baru untuk mengejar klaim mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Poliferasi organisasi dan konferensi internasional telah memberikan peluang besar bagi terciptanya kontak internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Pada bab selanjutnya, skripsi ini akan

membahas lebih lengkap mengenai taktik Gerakan *#MeToo* dalam upaya mencapai tujuan dari gerakan itu sendiri.